

**FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA  
(Studi Kasus di Kecamatan Banyudono)**



Skripsi Diajukan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi  
Pada Program Studi Akuntansi

Diajukan Oleh:

**NINIT AYU AYUL CHIFAH**

**19210039**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA  
2023**

**FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA  
(Studi Kasus di Kecamatan Banyudono)**



Skripsi Diajukan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi  
Pada Program Studi Akuntansi

Diajukan Oleh:

**NINIT AYU AYUL CHIFAH**

**19210039**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA  
2023**

## PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nama : Ninit Ayu Ayu Chifah  
NIM : 19210039  
Program Studi : Akuntansi  
Judul : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas  
Dana Desa (Studi Kasus di Kecamatan  
Banyudono)  
Disetujui dan disahkan :  
Hari : Jum'at  
Tanggal : 25 Agustus 2023

### Pembimbing



Nur Kholis, SE., M.Sc  
NIDN. 0516048801

Mengetahui,  
Wakil Ketua-1 Bidang Akademik



Ari Susanti, S.Pt., M.M

NIDN. 0323048302

## PENGESAHAN SKRIPSI

**Nama** : Ninit Ayu Ayul Chifah  
**NIM** : 19.21.0039  
**Jurusan** : S1 Akuntansi  
**Judul** : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa  
(Studi Kasus di Kecamatan Banyudono)

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan tim penguji Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta (STIE Surakarta) dan diterima untuk memenuhi persyaratan gelar Sarjana Ekonomi.

Pada Hari : Jum'at

Tanggal : 15 September 2023

Tim Penguji :

Ketua : Nur Kholis, S.E., M.Sc

Anggota : Arif Farida, S.E., M.A

Tanda tangan  
(.....)  
(.....)

Mengetahui

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta

  
Budi Istiyanto, S.E., M.M., M.H.

NIDN. 0625127401

## PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ninit Ayu Ayul Chifah

NIM : 19.21.0039

Program studi : S1 Akuntansi

Judul Skripsi : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa (Studi Kasus di Kecamatan Banyudono)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat adalah benar-benar hasil karya sendiri. Apabila ternyata dikemudian hari ditemukan bahwa skripsi saya hasil plagiat dan hasil karya orang lain, maka saya bersedia membatalkan/meninggalkan keserjanaan saya atau saya bersedia diberikan sanksi sesuai dengan perundangan yang berlaku.

Pembuat Pernyataan,



Ninit Ayu Ayul Chifah

## MOTTO

*“ Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar.”*

(Qs. Ar-Ruum:60)

*“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.*

*Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.”*

(Q.S Al-Insyirah, 94:5-6)

*“God has perfect timing, never early, never late. It takes a little patience and it takes a lot of faith, but it's a worth the wait”*

*Untuk masa-masa sulitmu, biarlah Allah yang menguatkanmu. Tugasmu hanya berusaha agar jarak antara kamu dengan Allah tidak pernah jauh.”*

*“Orang lain ga akan paham struggle dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian succes storiesnya aja. Jadi berjuanglah untuk diri sendiri meskipun gak akan ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.*

*Jadi tetep berjuang ya.”*

## **PERSEMBAHAN**

Bismillahirrohmaanirrohiim skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya tercinta Bapak Mukharom dan Ibu Yatminah yang telah memberikan doa restu, semangat, perhatian, cinta dan kasih sayang, dukungan moril maupun material dan kesabarannya menunggu menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakakku tercinta Septia Eka Saputri dan Dewi Oktavia Ningsih yang selalu memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan selalu memberikan suntikan semangat.
3. Mas Fernanda yang telah membantu menyemangati saya ketika mengerjakan skripsi ini.
4. Dosen yang telah berjasa begitu besar, berkat bimbingan dan doa yang pada akhirnya saya bisa melangkah sampai sejauh ini. Semoga selalu dalam lindungan-Nya.
5. Sahabat-sahabat seperjuangan dan seluruh teman-teman S1 Akuntansi R1.

## KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul, **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS DI KECAMATAN BANYUDONO)**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat program studi srata 1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak-pihak yang telah banyak memberikan bantuan, membimbing, dan memberikan dorongan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini, untuk itu terimakasih kepada :

1. Bapak Budi Istiyanto, S.E., M.M., M.H. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.
2. Ibu Astuning Saharsini S.E., M.Acc selaku Ketua program S1 Akuntansi
3. Bapak Nur Kholis, S.E, M.Sc selaku pembimbing satu yang selalu memberikan saran, bijaksana, dan sabar selama penelitian dan penulisan skripsi ini.
4. Perangkat desa yang telah bersedia menjadi responden dan mengisi kuesioner.
5. Kedua orang tua dan kedua saudara tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan dan motivasi.
6. Mas Fernanda yang memotivasi untuk segera lulus.
7. Teman-teman yang memberikan dukungan dan motivasi agar bisa lulus bersama-sama.
8. Untuk semua pihak yang terlibat dan membantu selama penulisan Skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya kekurangan dalam penyusunan Skripsi ini. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun.

Penulis berharap agar Skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Surakarta, Agustus 2023

Ninit Ayu Ayul Chifah

## DAFTAR ISI

|                                 | Halaman |
|---------------------------------|---------|
| HALAMAN JUDUL .....             | i       |
| HALAMAN PERSETUJUAN .....       | ii      |
| HALAMAN PENGESAHAN .....        | iii     |
| HALAMAN PERYATAAN .....         | iv      |
| HALAMAN MOTTO .....             | v       |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....       | vi      |
| KATA PENGANTAR .....            | vii     |
| DAFTAR ISI .....                | ix      |
| DAFTAR TABEL .....              | xi      |
| DAFTAR GAMBAR .....             | xii     |
| DAFTAR LAMPIRAN .....           | xii     |
| ABSTRAK .....                   | xiv     |
| <i>ABSTRACT</i> .....           | xv      |
| BAB I : PENDAHULUAN             |         |
| A. Latar Belakang Masalah ..... | 1       |
| B. Rumusan Masalah .....        | 6       |
| C. Tujuan Penelitian .....      | 7       |
| D. Manfaat Penelitian .....     | 7       |

## BAB II : LANDASAN TEORI

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| A. Tinjauan Pustaka .....     | 9  |
| B. Penelitian Terdahulu ..... | 19 |
| C. Kerangka Pemikiran .....   | 23 |
| D. Hiotesis .....             | 24 |

## BAB III : METODE PENELITIAN

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| A. Objek Penelitian .....        | 28 |
| B. Sumber dan Jenis Data .....   | 28 |
| C. Populasi dan Sampel .....     | 29 |
| D. Teknik Pengumpulan Data ..... | 31 |
| E. Definisi Operasional .....    | 32 |
| F. Teknik Analisis Data.....     | 33 |

## BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| A. Identitas Responden..... | 40 |
| B. Analisis Data .....      | 43 |
| C. Pembahasan .....         | 53 |

## BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 58 |
| B. Saran .....      | 59 |

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1. Anggaran Dana Desa .....                                | 1  |
| Tabel 2. Penelitian Terdahulu .....                              | 21 |
| Tabel 3. Populasi Responden .....                                | 20 |
| Tabel 4. Sampel Responden Penelitian .....                       | 31 |
| Tabel 5. Definisi Operasional Variabel .....                     | 32 |
| Tabel 6. Distribusi Kuesioner .....                              | 40 |
| Tabel 7. Distribusi Kuesioner Setiap Desa .....                  | 41 |
| Tabel 8. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia .....          | 42 |
| Tabel 9. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin ..... | 42 |
| Tabel 10. Hasil Statistik Deskriptif .....                       | 43 |
| Tabel 11. Hasil Uji Validitas .....                              | 45 |
| Tabel 12. Hasil Uji Reliabilitas .....                           | 46 |
| Tabel 13. Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Test .....     | 47 |
| Tabel 14. Hasil Uji Heteroskedasitas .....                       | 48 |
| Tabel 15. Hasil Uji Multikolinieritas .....                      | 49 |
| Tabel 16. Analisis Regresi Berganda .....                        | 49 |
| Tabel 17. Hasil Uji F .....                                      | 50 |
| Tabel 18. Hasil Uji T .....                                      | 51 |
| Tabel 19. Hasil Koefisien Determinasi .....                      | 53 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Gambar 2. Kerangka Berpikir ..... | 18 |
|-----------------------------------|----|

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian

Lampiran 2. Jawaban Responden

Lampiran 3. Hasil SPSS

# **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

**(Studi kasus di Kecamatan Banyudono)**

**NINIT AYU AYUL CHIFAH**

**NIM 19.21.0039**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Banyudono. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif dengan sampel yang berjumlah 113 responden dengan alat bantuan SPSS 25. Metode analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hipotesis yang diajukan adalah kompetensi pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini adalah kompetensi pengelolaan dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. sedangkan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

***Kata Kunci : Kompetensi Pengelolaan Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal.***

## ***Factors Influencing Village Fund Management Accountability***

***(Case study in Banyudono District)***

***Ninit Ayu Ayul Chifah***  
***19210039***

### ***ABSTRACT***

*This research was conducted to find out how much the factors influence the accountability of managing village funds in Banyudono District. The research method used is quantitative research with a sample of 113 respondents with the help of SPSS 25. The data analysis method uses multiple linear regression. The hypothesis put forward is that competence in village fund management influences village fund management accountability, village government organizational commitment influences village fund management accountability, information technology utilization influences village fund management accountability and the internal control system influences village fund management accountability. The results of this study are village fund management competence, village government organizational commitment, and the use of information technology influence the accountability of village fund management. while the internal control system has no effect on the accountability of managing village funds.*

***Keywords: Village Fund Management Competence, Village Government Organizational Commitment, Utilization of Information Technology, Internal Control System.***

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Desa adalah sistem pemerintah yang paling rendah di Indonesia. Peran, fungsi dan kontribusinya menempati posisi yang strategis. Alasan mengapa desa merupakan unit penting yang perlu mendapatkan perhatian negara dan birokrasi negara karena sebagai besar masyarakat tinggal di desa dan banyak masalah yang hanya bisa diselesaikan dari unit-unit wilayah di pedesaan. Jadi jika ingin menemukan ukuran yang tepat untuk dievaluasi bangsa yang makmur atau tidak, maka desa merupakan unit yang paling cocok untuk dipelajari (Putri et al., 2022).

| No | DESA        | 2019        | 2020        | 2021          |
|----|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 1  | Dukuh       | 807.551.000 | 789.631.000 | 718.555.000   |
| 2  | Jipangan    | 756.576.000 | 781.564.000 | 718.804.000   |
| 3  | Jembungan   | 757.799.000 | 786.262.000 | 1.027.723.000 |
| 4  | Sambon      | 768.642.000 | 784.484.000 | 734.987.000   |
| 5  | Kuwiran     | 734.279.000 | 779.840.000 | 707.765.000   |
| 6  | Cangkringan | 744.631.000 | 766.619.000 | 710.097.000   |
| 7  | Ngaru-Aru   | 753.302.000 | 767.999.000 | 700.129.000   |
| 8  | Bendan      | 742.134.000 | 778.332.000 | 1.076.579.000 |
| 9  | Ketaon      | 747.053.000 | 776.579.000 | 720.225.000   |
| 10 | Banyudono   | 743.426.000 | 773.087.000 | 722.794.000   |
| 11 | Batan       | 733.087.000 | 763.815.000 | 708.810.000   |
| 12 | Dengungan   | 755.374.000 | 787.121.000 | 748.829.000   |
| 13 | Bangak      | 747.097.000 | 777.173.000 | 719.875.000   |
| 14 | Trayu       | 738.597.000 | 770.279.000 | 723.127.000   |
| 15 | Tanjungsari | 758.371.000 | 774.418.000 | 734.905.000   |

Sumber: Laporan Keuangan Kecamatan Banyudono

Pengelola dana desa tersebut memerlukan aspek pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dimana salah satu karakteristik dari *Good*

*Governance* adalah akuntabilitas. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk tanggungjawab pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Jadi, akuntabilitas pemerintahan sangat diperlukan sebagai penunjang penerapan otonomi desa agar dapat berjalan dengan baik (Nafidah & Suryaningtyas, 2017).

Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT) Melaksanakan pencairan dana desa sebesar 20% pada September 2022 khusus untuk program ketahanan pangan. Nantinya dana tersebut terbagi dalam penggunaannya, seperti untuk pembangunan infrastruktur di lokasi ketahanan pangan, bantuan sosial kepada kelompok tani, pemberdayaan kelompok tani, hingga penambahan modal usaha BUM Desa unit usaha ketahanan pangan (Okezone Finance, 2022).

Pengelolaan dana desa dapat dipengaruhi oleh kompetensi pengelola dana desa. Variatifnya karakteristik desa, kompetensi pengelolaan dana desa dan regulasi yang relatif baru diduga terdapat cukup banyak penyelewengan dalam tiap tahapan pengelolaan dana desa, mulai dari proses perencanaan hingga tahap monitoring dan evaluasi (Setiana, 2017)

Komitmen organisasi adalah perilaku dimana individu dimana bisa menerima dan yakin atas tujuan didalam organisasi, dan memiliki keinginan untuk menetap bersama ketika sebuah komitmen untuk bekerja secara benar, taat pada aturan, bekerja dengan jujur dijalankan oleh aparatur maka sebuah

akuntabilitas dalam proses pengelolaan dana desa akan terwujud (Riski & Maryono, 2022).

Akuntabilitas dalam pemerintahan desa meliputi pertanggungjawaban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilakukan dalam kaitannya dengan pembangunan dan pengelolaan desa. Pelaporan mengacu pada masalah keuangan APBDes, dimana penyaluran Dana desa merupakan salah satu komponennya. Tugas tanggung jawab melampaui kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Namun, tanggung jawab berkelanjutan berfokus pada penggunaan sumber daya yang bijaksana, efektif, efisien dan ekonomis. Administrasi publik dan manajemen perusahaan harus menekankan tujuan utama akuntabilitas sehingga setiap manajer atau manajemen dapat memediasi pelaporan keuangan melalui penyusunan laporan keuangan (Pahlawan *et al.*, 2020).

Kasus penyelewengan keuangan desa juga terjadi di Desa Tanjungsari, Kecamatan Banyudono. Kebijakan Negeri Kabupaten Boyolali menyelidiki kasus penyimpangan tersebut dan memperkirakan kerugian Negara mencapai Rp1,2 miliar. Kepala Kebijakan Negeri Kabupaten Boyolali mengatakan penyimpangan di Desa Tanjungsari itu terkait ganti tanah kas desa yang terkena proyek jalan tol ruas Salatiga-Kartasura. Melihat kasus penyimpangan yang terjadi dikalangan pemerintah desa, perlu dilakukan pengawasan yang lebih serius. Jika masalah penyimpangan dibiarkan begitu saja akan berdampak terhadap perkembangan desa itu sendiri selain itu menggagalkan tujuan dari adanya dana desa (Solo Pos.com,2019).

Munti dan Heru (2017), meneliti pengaruh kapasitas aparatur desa, ketaatan pelaporan keuangan dan kualitas pengawasan BPD terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireun dengan menunjukan kapasitas aparatur desa, ketaatan perangkat desa, berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan perangkat desa. Selain itu, menurut (Mada *et al.*, 2017) melakukan penelitian tentang pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel penelitian berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun dalam penelitian Widyatama dkk (2017) memberikan hasil bahwa kompetensi aparat pengelola dana desa tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas dana desa.

Lebih lanjut, penelitian terkait akuntabilitas dana desa telah dilakukan sebelumnya oleh Fitria (2019) komitmen organisasi pemerintah desa melalui PP No 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa perangkat desa terdiri dari sekertaris desa, pelaksanaan wilayah, dan pelaksana teknis, yang menyatakan bahwa komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun dalam penelitian Perdana (2018) memberikan hasil bahwa komitmen organisasi pemerintah desa tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas dana desa.

Komputer sebagai salah satu alat teknologi informasi merupakan alat bantu kerja dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah desa, sehingga aparatur desa mampu untuk menginput data secara lebih cepat dari

pada menggunakan cara manual. Penggunaan komputer ini mempunyai keunggulan dalam keakuratan dan keketapan hasil operasi data sehingga akan mengurangi kesalahan yang terjadi. Penjelasan tersebut didukung penelitian yang dilakukan oleh Sugiarti dan Yudianto (2017) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun hasil berbeda ditemukan oleh Pahlawan *et al.* (2020) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak signifikan terhadap pengaruh akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Sistem pengendalian internal merupakan bagian dari proses implementasi tanggung jawab pemerintah publik, dianggap masih belum mampu menyediakannya akuntabilitas publik atas pendapat BPK atas pelaporan keuangan pemerintah diproduksi oleh pemerintah. Penjelasan tersebut didukung penelitian yang dilakukan oleh Widyatama *et al.*, (2017) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun hasil berbeda ditemukan oleh Nafsiah (2020) memberikan hasil bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas dana desa.

Penelitian ini dilakukan berdasarkan fenomena yang terjadi dan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan masih tidak konsisten dari hasil yang didapat sehingga peneliti ingin mengetahui akuntabilitas dana desa. Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu penambahan Sistem Pengendalian Internal karena dengan penggunaan Sistem Pengendalian Internal, diharapkan mampu memperbaiki kualitas penyusunan administrasi

pengelolaan dana desa. Sistem Pengendalian internal yang baik dapat mencegah pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat memperoleh efisiensi, efektivitas, dan mencegah terjadinya kerugian dana desa.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah Kompetensi Pengelola Dana Desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Banyudono?
2. Apakah Komitmen Organisasi Pemerintah Desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Banyudono?
3. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Banyudono?
4. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Banyudono?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, selanjutnya dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh Kompetensi Pengelola Dana Desa terhadap Akuntabilitas Pengelola Dana Desa di Kecamatan Banyudono

2. Mengetahui pengaruh Komitmen Organisasi Pemerintah Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Banyudono
3. Mengetahui pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Banyudono
4. Mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Banyudono

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, dengan penjelasan sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan memberikan bukti secara empiris mengenai pengaruh kompetensi pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, partisipasi masyarakat dan sistem internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dan penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam menambah pengetahuan yang sejenis.

##### **1. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Pemerintah Kecamatan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan mengenai penggunaan keuangan desa.

- b. Bagi Pemerintah Desa, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan terkait akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.
- c. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana desa.
- d. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai penambah wawasan baru mengenai Pemerintah Desa dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Teori Yang Relevan**

##### **1. *Stewardship Theory***

Teori *stewardship* menjelaskan kompetensi aparatur desa dilihat dari bagaimana aparatur desa (*steward*) dapat menciptakan keputusan serta menentukan tindakan yang paling tepat untuk tujuan optimalisasi kinerja perusahaan yang dipimpinnya (Rahayu & Gudono, 2016). Terkait dengan teori *stewardship* kesuksesan pemerintah desa (*steward*) yang dinilai oleh prinsipal menunjukkan bahwa pemerintah desa bekerja dengan mendahulukan kepentingan organisasi/ lembaga (Asmawati & Basuki, 2019). Implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini menjelaskan keberadaan pemerintah desa (*steward*) dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab akan mengarahkan kemampuan dan keahliannya. Pemerinth desa melaksanakan tugasnya dalam membuat pertanggungjawaban keuangan berupa penyajian laporan keuangan yang akuntabel sesuai dengan karakteristik laporan keungan (relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan).

Teori *stewardship* adalah teori yang sesuai dalam penelitian ini dimana setiap aparatur desa memiliki tujuan yang sama untuk memperbaiki desa guna mensejahterakan masyarakat dengan cara memberikan pelayanan yang baik, sehingga dapat tercapai akuntabilitas dana desa dengan terpenuhinya laporan

pertanggungjawaban yang baik sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku. Teori ini juga mengharapkan komitmen organisasi yang berada didalam perusahaan lebih menjunjung tujuan perusahaan dibandingkan dengan tujuan perorangan agar mencapai sasaran. Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dana desa mempermudah aparaturnya dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan kewajibannya sebagai *steward* untuk memberikan pelayanan kepada publik.

## 2. Kompetensi Pengelola Dana Desa

Kompetensi adalah bakat dan keahlian individu apapun yang dapat dibuktikan, dapat dihubungkan dengan kinerja yang efektif dan baik sekali. Rendahnya kinerja yang masih memerlukan perbaikan tersebut diasumsikan karena adanya beberapa faktor-faktor yang dapat memperbaiki kinerja karyawan, antara lain: keinginan, pengetahuan dan keterampilan, iklim, dukungan dan penghargaan, kompetensi, sikap etika kerja, tingkat penghasilan, dan tingkat pendidikan. Dari setiap faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai, terdapat masalahmasalah yang cukup penting untuk disikapi antara lain: kurangnya kemampuan dan keterampilan pegawai yang masih memerlukan perbaikan dan pelatihan, pemberian motivasi dan dukungan yang kurang/rendah dari pimpinan, kurangnya perhatian pimpinan dalam memperhatikan suasana kekeluargaan, keharmonisan dan kesejahteraan pegawai, kurangnya keinginan dari pegawai untuk berubah agar menjadi lebih baik lagi, dan pimpinan kurang memberi penghargaan kepada

pegawainya, pegawai sering menghabiskan waktu kerja dengan melakukan hal-hal yang tidak berhubungan dengan pekerjaannya, seperti: bermain game online, facebook, mendengarkan musik, dan sebagainya (Rohida, 2018)

### 3. Komitmen Organisasi Pemerintah Dana

Komitmen adalah kesanggupan untuk bertanggung jawab terhadap hal-hal yang dipercayakan kepada seseorang. Komitmen tidak ada hubungannya sama sekali dengan bakat, kepintaran atau talenta. Komitmen yang kuat akan memungkinkan seseorang mampu mengeluarkan sumber daya fisik, mental, dan spiritual tambahan yang bisa diperoleh, sebaliknya tanpa komitmen, pekerjaan besar akan sulit dilaksanakan, komitmen ialah sikap yang mencerminkan sejauh mana sikap individu atau pegawai mengenal dan terkait pada organisasinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi adalah kemampuan pada karyawan dalam mengidentifikasi dirinya dengan nilai-nilai, aturan-aturan, tujuan organisasi atau perusahaan, mencakup unsur loyalitas terhadap perusahaan, dan keterlibatan dalam pekerjaan (Masruhin & Kaukab, 2019)

Komitmen Organisasi terhadap organisasi dapat didefinisikan sebagai berikut :

- a. Komitmen adalah keinginan yang kuat untuk mengingat organisasi
- b. Komitmen adalah bekerja keras untuk menjadi anggota organisasi
- c. Komitmen adalah keyakinan yang kuat untuk tujuan dan nilai organisasi

Komponen yang mempengaruhi komitmen organisasi ada tiga, karyawan memilih untuk tetap atau meninggalkan sebuah organisasi berdasarkan norma yang dimilikinya antara lain:

a. Komitmen efektif (*Affective Commitment*)

Komitmen efektif berkaitan dengan adanya keterlibatan untuk terikat dengan organisasi

b. Komitmen berkelanjutan ( *Continuance Commitment*)

Komponen berkerlanjutan adalah suatu komitmen berdasarkan persepsi pada kebutuhan rasional. Dengan itu maka, komponen ini terbentuk atas dasar untung rugi, dipertimbangkan apa yang sudah dikorbankan apabila akan menetap pada suatu organisasi

c. Komitmen Normatif ( *Normative Commitment*)

Komitmen normative adalah komitmen yang didasarkan pada diri seseorang pada suatu atau keyakinan pada individu untuk bertanggung jawab terhadap organisasi. Individu harus bertahan karena loyalitas Meyer and Allen

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi pemerintah desa adalah suatu keadaan dimana pemerintah desa memiliki tujuan untuk mempertahankan anggotanya agar menjalankan semua tugas dan tanggungjawab kegiatan desa sesuai dengan aturan yang berlaku.

#### 4. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi merupakan kumpulan dari beberapa unsur teknologi seperti komputer, perangkat (*hardware* dan *software*), database, jaringan dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi. (Sugiarti dan Yudianto, 2017), pemanfaatan teknologi informasi merupakan keadaan atau sikap seorang akuntan untuk menggunakan teknologi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya. Pemanfaatan teknologi informasi mencakup (pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan mengelola data menjadi sebuah informasi sebagai keperluan para pemegang kepentingan untuk mengambil tindakan atau keputusan dalam memberikan pelayanan baik kepada publik (Aulia, 2018)

Salah satu bentuk perkembangan dari teknologi informasi adalah berkembangnya jaringan komputer, dimana setiap komputer bisa saling berkomunikasi satu sama lain dan juga saling bertukar informasi antar komputer di dalam satu jaringan. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipat gandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya (Wilkinson, 2000). Teknologi informasi di bidang pemerintah disebut dengan *E-government*. *E-government* adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan pihak-pihak yang lain. Teknologi ini menggunakan

intranet dan internet yang digunakan untuk mengolah data administrasi tata usaha, pelayanan masyarakat, pengelolaan dan dokumentasi data penduduk, perencanaan, statistika, pengambilan keputusan, dan lain-lain.

Perubahan kerja dari manual menjadi sistem terkomputerisasi ini akan memberikan peringkat dalam hal (Wilkinson, 2000):

- a. Pemrosesan transaksi dan data lainnya lebih cepat
- b. Keakurasian dalam perhitungan dan perbandingan lebih besar
- c. Biaya pemrosesan masing-masing transaksi lebih rendah
- d. Penyiapan laporan dan output lainnya lebih tepat waktu
- e. Tempat penyimpanan data lebih ringkas dengan aksesibilitas lebih tinggi ketika dibutuhkan
- f. Pilihlah pemasukan data dan penyediaan output lebih luas/banyak
- g. Produktivitas lebih tinggi bagi karyawan dan manager yang belajar untuk menggunakan komputer secara efektif dalam tanggung jawab rutin dan pembuatan keputusan

Penggunaan teknologi informasi di dalam pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah termasuk juga dalam menyusun pelaporan keuangan. Pada sektor pemerintah, perubahan lingkungan strategis serta kemajuan teknologi mendorong aparatur pemerintah untuk mengantisipasi paradigma baru menggunakan upaya

peningkatan kinerja birokrasi dan perbaikan pelayanan menuju terwujudnya pemerintah yang baik. Agar manfaat dan tujuan penyajian laporan keuangan pemerintah dapat dipenuhi maka informasi yang disajikan harus merupakan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Informasi harus bermanfaat bagi para pemakai, maka sama saja dengan mengatakan bahwa informasi harus mempunyai nilai (Suwardjono, 2005)

#### 5. Sistem Pengendalian Internal

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, sistem pengendalian internal (SPI) adalah “suatu proses terpadu dari kegiatan dan operasi yang dilakukan secara terus menerus oleh manajemen dan seluruh pegawai, yang memberikan jaminan yang cukup bagi tercapainya tujuan organisasi melalui efektivitas dan operasi yang efisien. Keandalan pelaporan keuangan, perlindungan aset negara dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan". Sistem Pengendalian Internal Negara (SPIP) adalah sistem pengendalian internal yang dilaksanakan sepenuhnya di kantor negara dan kantor wilayah pemerintah.

Audit daerah di Indonesia diatur oleh Peraturan SPIP No. 60 Tahun 2008 Pemerintah, Bagian Kedua, yang mengatur tentang pengendalian internal atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Inspektur daerah adalah penyelenggara inspeksi internal (inspektur internal) dari kota. Sebagai pengawas internal, keberadaan otoritas pengawas daerah dinilai

sangat penting sesuai dengan tugas pokoknya, yakni mengendalikan tugas dan kegiatan perangkat daerah yang terkait dengan tugas dan tugas pemerintahan daerah sesuai dengan tugas daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD). Pengawasan dewan meningkatkan akuntabilitas keuangan dengan mengevaluasi dan meningkatkan proses pengendalian internal, manajemen risiko dan proses tata kelola (Widyatama *et al.*, 2017)

#### 6. Konsep Akuntabilitas

Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan proses pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawab, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan BPD. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan desa tersebut, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat (Halim, 2007). Pemerintah desa harus dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Untuk mewujudkan hal tersebut, adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melakukan amanat rakyat (Mulyana, 2006)

Akuntabilitas pengelolaan dana desa sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana desa yang telah dipercayakan sebagai pelaksanaan kewajiban kepala desa dalam rangka pencapaian tujuan desa. Akuntabilitas diharapkan mampu memperbaiki kualitas kinerja pemerintahan desa sehingga pengelolaan dana desa menjadi tolak ukur kepercayaan masyarakat. Kepercayaan inilah yang akan mengurangi tingkat penyimpangandana desa sehingga masyarakat desa dapat diberdayakan menjadi masyarakat mandiri dan pada akhirnya menjadi desa mandiri.

Konsep akuntabilitas dalam penelitian ini adalah tanggung jawab organisasi desa sebagai tim pelaksana dan pengelolaan dana desa, melaporkan kepada otoritas yang lebih tinggi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatannya, khususnya di bidang pengelolaan keuangan. kewajiban. program, wilayah, masyarakat.

## 7. Pengelolaan Dana Desa

Dana desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang terkait dengannya dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai peraturan. Dasar Hukum Pengaturan Desa dan Dana Desa diatur dalam UU 71 Ayat 1 tentang Desa yang berisi:

- a. PP 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6/2014 tentang desa;
- b. PP 60/2014 sebagaimana telah diubah dengan PP 22/2015 dan Peraturan Pemerintah 88/2016 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN;

Sumber Pendapatan Desa berasal dari:

- a. Pendapatan Asli Desa
- b. Dana Desa yang bersumber APBN
- c. Bagian dari Hasil PDRD Kab/Kota
- d. Dana Desa dari Kab/Kota
- e. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kab/Kota
- f. Hibah dan sumbangan pihak Ke-3
- g. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah.

Anggaran Dana Desa dalam APBN ditentukan 10% dari dan di luar Dana Transfer Daerah secara bertahap. Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan:

- a. Jumlah Penduduk,
- b. Angka Kemiskinan,
- c. Luas Wilayah, dan
- d. Tingkat Kesulitan Geografis

Tujuan Dana Desa:

- a. Peningkatan pelayanan publik di desa,
- b. Memajukan perekonomian desa,

- c. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Pengelolaan Dana Desa merupakan kegiatan yang meliputi Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan petanggungjawaban Keuangan Desa. Pengelolaan Dana Desa terdaat dasar hukum pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan dana desa mempunyai asas-asas berisi transparan, akuntabel, partisipatif, Tertib dan disiplin anggaran. Jangka waktu pengelolaan dana desa mulai dari bulan juni hingga bulan september tahun berjalan atau satu tahun anggaran (Maharini, 2019)

## **B. Penelitian Terdahulu**

Sebagai acuan dalam penelitian, maka dibutuhkan sebuah penelitian terdahulu sebagai pendukung bagi penelitian ini. Adapun penelitian tersebut diantara lain:

Penelitian dari Kartika Restu dan Astria (2020) yang berjudul” Pengaruh Kompetensi, Komitmen Organisasi, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel (X1): Kompetensi Aparat, (X2): Komitmen Organisasi, (X3) :Transparansi, (X4): Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas dana desa.

Penelitian dari Mutmainah dan Bambang (2017) yang berjudul” Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah (SPIP) di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten pekalongan”  
Sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian dari Isnaeni Nurkhasanah (2019) yang berjudul” Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran, Pengawasan, dan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa se-Kecamatan Pringsut)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel (X1): Kompetensi Sumber Daya Manusia,(X2): Pemanfaatan Teknologi Informasi,(X3): Partisipasi Penganggaran,(X4):Komitmen Organisasi Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas dana desa.

Penelitian dari Detik Kumalasari dan Riharjo (2017) yang berjudul” Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa” Transparansi Pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas dana desa.

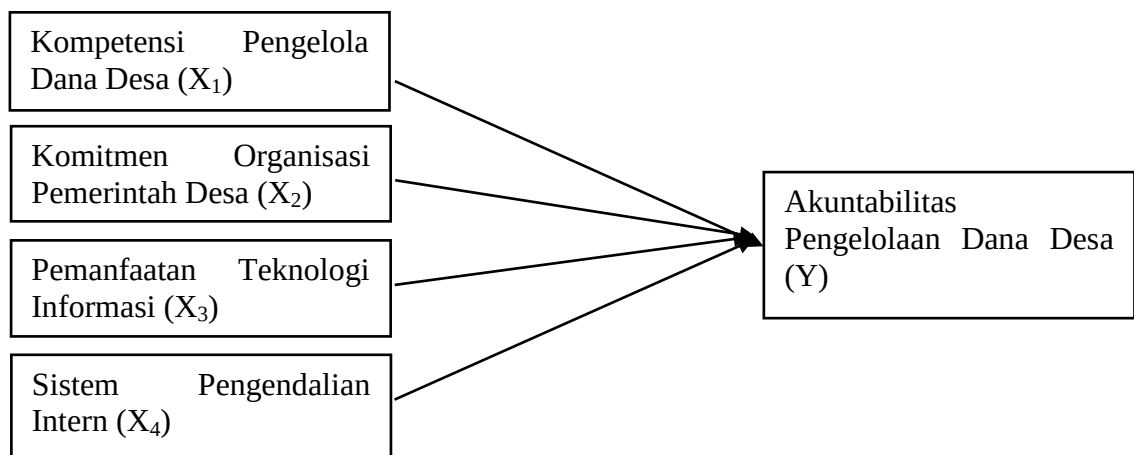
**Tabel 2. Penelitian Terdahulu**

| No | Penulis dan Tahun                           | Judul                                                                                                                                       | Variabel                                                                                                                                                                    | HASIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Kartika Restu Aprilya, Astria Fitria (2020) | Pengaruh Kompetensi, Komitmen Organisasi, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa              | <p>X1: Kompetensi Aparat</p> <p>X2: Komitmen Organisasi</p> <p>X3: Transparansi</p> <p>X4: Partisipasi Masyarakat</p> <p>Variabel Y: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Des</p> | <p>Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa</p> <p>Komitmen organisasi dana desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Gresik.</p> <p>Transparansi dana desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Gresik.</p> <p>Partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa di Kabupaten Gresik.</p> |
| 2. | Mutmainah, Bambang Agus Pramuka (2017)      | Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten pekalongan | <p>Variabel X: Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)</p>                                                                                                           | Sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|    |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | Isnaeni Nurkhasanah (2019)                  | Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran, Pengawasan, dan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa se-Kecamatan Pringsut) | <p>X1: Kompetensi Sumber Daya Manusia</p> <p>X2: Pemanfaatan Teknologi Informasi</p> <p>X3: Partisipasi Penganggaran</p> <p>X4: Komitmen Organisasi Pemerintah</p> <p>Variabel Y: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa</p> | <p>Kompetensi Sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.</p> <p>Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.</p> <p>Partisipasi Anggaran berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.</p> <p>Komitmen Organisasi Pemerintah Desa berpengaruh negatif terhadap Akuntabilitas Dana Desa</p> <p>Pengawasan tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.</p>                            |
| 4. | Detik Kumalasari Ikhsan Budi Riharjo (2017) | Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa                                                                                                                                                                   | <p>Variabel X: Transparansi Pemerintah desa</p> <p>Variabel Y: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa</p>                                                                                                                    | <p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Bomo Kecamatan Regojampi Kabupaten Banyuwangi telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan Alokasi dana desa. Sedangkan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa secara fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang transparansi dan akuntabel, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya perbaikan sehingga perlu pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> |

### C. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pikir atau Kerangka Pemikiran menurut Sugiyono (2019), merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Berikut merupakan gambaran kerangka pikir dalam penelitian ini :



**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Berikut adalah pengertian dari masing-masing variabel:

#### a. Variabel Independen (X)

Menurut Sugiyono (2019:69) variabel independen atau yang sering disebut variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang terjadi sebab timbulnya variabel dependen. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Kompetensi Pengelolaan Dana Desa : X1
2. Komitmen Organisasi Pemerintah Desa : X2
3. Partisipasi Masyarakat : X3
4. Sistem Pengendalian Internal : X4

Variabel dependen (Y)

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari adanya variabel independen Sugiyono (2019 :69). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah akuntabilitas dana desa.

#### **D. Hipotesis**

1. Pengaruh Kompetensi Pengelola Dana Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Aparat selaku pengelola kebijakan wajib mempertanggungjawabkan segala aktivitas pengelolaanya kepada prinsipal. Sehingga, pemerintah membutuhkan dan berusaha secara maksimal untuk membentuk aparatur yang memiliki motivasi dan kompetensi yang tinggi agar memberikan hasil yang memuaskan (Mada *et al.*, 2017). Semakin tinggi tingkat aparatur, maka semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desanya. Hal ini dikarenakan aparatur yang berkompeten akan mampu melaksanakan tugasnya dengan tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, tingginya kompetensi yang dimiliki aparatur akan menuntun aparatur untuk bekerja efektif, efisien, dan

produktif. Aparatur yang berkompeten akan menyelesaikan kerjanya dengan maksimal, sehingga berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa (Masruhin & Kaukab, 2019). Hal ini didukung hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kompetensi aparat desa berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa (Masruhin & Kaukab, 2019; Nazar *et al.*, 2021).

### **H1 : Kompetensi Pengelola Dana Desa berpengaruh positif terhadap**

#### **Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

2. Pengaruh Komitmen Organisasi Pemerintah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Komitmen organisasi merupakan elemen yang sangat penting dalam akuntabilitas (Mada *et al.*, 2017). Adanya komitmen organisasi dapat mendukung pengelolaan dana desa agar program-program dapat terlaksana dengan baik. Keberhasilan pengelolaan dana desa yang akuntabel merupakan wujud komitmen aparatur desa dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa khususnya dana desa. Komitmen organisasi yang tinggi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa, sehingga akan mendorong keberhasilan pengelolaan dana desa akuntabel. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Yulisa *et al.*, 2020)

### **H<sub>2</sub> : Komitmen Organisasi Pemerintah desa berpengaruh positif terhadap**

#### **Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.**

### 3. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Penelitian yang dilakukan Aulia (2018) mengemukakan bahwa Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Artinya semakin bagus pemanfaatan teknologi informasi, maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel. Pengelolaan desa yang baik dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang sangat pesat kemajuannya, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang dibutuhkan masyarakat dapat tersedia dengan cepat dan akurat, tidak hanya masyarakat yang mudah mendapatkan informasi pemerintah pusat juga dapat dengan mudah mendapatkan informasi pemerintah pusat dapat dengan mudah memperoleh informasi guna meningkatkan potensi yang ada di desa Perdana (2018)

#### **H<sub>3</sub> : Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

### 4. Pengaruh Sisten Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Peran sistem pengendalian internal dan pengawasan untuk mencapai pengelolaan keuangan yang akuntabel sangat signifikan serta efektif dan efisien. Penjelasan bahwa keberadaan pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta tanggung jawabnya akan mengerahkan semua kemampuan dan keahliannya. Dengan adanya sistem pengendalian yang baik

terhadap pemerintah desa tentunya akan berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan yang akuntabel. Penjelasan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Puspa & Prasetyo, 2020) bahwa sistem pengendalian internal jika dilakukan dengan baik maka organisasi akan melakukan kegiatan yang efektif dan efisien sehingga pelaporan keuangan tercapai yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal tersebut juga selaras dengan penelitian (Widyatama *et al.*, 2017) Sistem Pengendalian Internal dalam Pemerintahan merupakan faktor yang penting, disebabkan adanya sistem pengendalian dapat mempengaruhi pengambilan keputusan internal pemerintah desa dan dapat berimplikasi pada akuntabilitas pemerintah desa tersebut.

**H<sub>4</sub> : Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.**

4. Sistem Pengendalian Internal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, hal ini karena sistem pengendalian internal belum cukup aktif sehingga sistem pengendalian internal masih rendah.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan yang telah didapatkan penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Desa menjadi referensi pegawai maupun pihak-pihak yang ada dalam Pemerintah Desa agar senantiasa bekerja secara transparan yang bersih.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi akademisi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Akuntansi Pemerintahan khususnya mengenai Pengelolaan Dana Desa.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan umumnya bisa dijadikan referensi bagi mahasiswa jurusan ekonomi dan jurusan akuntansi untuk menambah ilmu dan wawasan serta sebagai sumber informasi dan perbandingan penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aprilya, K. R., & Fitria, A. (2020). Pengaruh Transparansi, Peran Perangkat Desa dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Conference on Economic and Business Inovation*, 35, 1586–1597.
- Asmawati, I., 1, & Prayino Basuki. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 23(2), 179–194.  
<https://doi.org/10.35591/wahana.v23i2.231>
- Aulia, P. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten 50 Kota. *Jurnal Online Mahasiswa Feb*, 1(1), 1–15.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/iaj/article/view/29261>
- Deti Kumalasari, & Riharjo, I. B. (2017). Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(11), 1–15.  
<http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2467/2470>
- Fitria, N. (2019). Regulasi, Komitmen Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Kinerja Pemerintah Desa. *JAAF (Journal of Applied Accounting and Finance)*, 3(2), 85–98.  
<http://dx.doi.org/10.33021/jaaf.v3i1.680>
- Ina Mutmainah, & Bambang Agus Pramuka. (2017). Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) Di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)*, 3(1). <https://doi.org/10.22515/jifa.v3i1.2369>
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di

Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(2), 106–115.

Masruhin, A., & Kaukab, M. E. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo). *Journal of Economic, Business and Engineering*, 1(1), 118–130.

Nafidah, L. N., & Suryaningtyas, M. (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat. *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(1), 214.

Nafsiah, S. N. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Bingkai Ekonomi*, 3(2), 104–112.

Nurkhasanah, I. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran, Pengawasan dan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa se-Kecamatan Pringsurat). *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah. Magelang*, 53(9), 1689–1699.

Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro, S. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 162. <https://doi.org/10.32400/iaj.29261>

Perdana, K. W. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bantul. *Program Studi Akuntansi. Universitas Muhammadiyah. Yogyakarta*.

Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa,

Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(2), 281–298.

Riski, R. A., & Maryono, M. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(1), 122–133.

Rohida, L. (2018). Pengaruh Era Revolusi Industri 4.0 terhadap Kompetensi Sumber Daya Manusia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia*, 6(1), 114–136. <https://doi.org/10.31843/jmbi.v6i1.187>

Sapartiningsih, Dwi, Suharno, dan D. K. (2018). Analisis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran, dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Applied Microbiology and Biotechnology*, 85(1), 2071–2079.

Setiana, D. N., & Yuliani, L. N. (2017). Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *University Reseach Colloquim*, 5, 205–210.

Sugiarti, E., & Yudianto, I. (2017). Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia , Pemanfaatan Teknologi Informasi , dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Survei Pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Klari , Kecamatan Karawang Timur , Kecamatan Majalaya). *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Padjadjaran. Sumedang*.

Suherwan, & Kamaliah. (2017). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus Di Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas). *Jurnal Tepak Manajemen Bisnis*, IX(2), 201–214.

Widyatama, lola Novita, & Diarespati. (2017). Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam

Mengelola Alokasi Dana Desa. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*,  
1(1), 122–129. <https://doi.org/10.54259/akua.v1i1.140>